

Diplomasi Publik Cina Sebagai Upaya Mendukung *One China Principle*

Rizal Budi Santoso¹, Windy Dermawan²

budisantosorizal@gmail.com, windy.dermawan@unpad.ac.id

¹Alumni Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Politik Peminatan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

²Dosen Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Politik Peminatan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

DOI: <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.15124>

Abstract

This article aims to explain the Chinese public diplomacy towards the Taiwanese public as an effort to support one China principle. Researchers see that this one China principle is a stepping stone for China and Taiwan in establishing interactions based on the 1992 consensus. In analyzing, the researcher used the concept of Mark Leonard with the aim to find out how Chinese public diplomacy towards the Taiwanese public was in an effort to support one China principle. The research method used in this research is a qualitative method that is supported by collecting data through literature studies and also reducing the data in conducting data analysis. The results of this study indicate that Chinese public diplomacy towards Taiwan as an effort to support one China principle has gained support for this one China principle coming from the Kuomintang Party and Taiwanese businessmen based on the 1992 consensus.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan mengenai diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan sebagai upaya untuk mendukung *one China principle*. Peneliti melihat bahwa *one China principle* ini merupakan batu pijakan bagi Cina dengan Taiwan dalam menjalin interaksi yang berasaskan pada konsensus 1992. Dalam menganalisa, peneliti menggunakan konsep dari Mark Leonard dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan sebagai upaya untuk mendukung *one China principle*. Metode riset yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif yang didukung dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga dilakukan reduksi data dalam melakukan analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Cina terhadap Taiwan sebagai upaya untuk mendukung *one China principle* telah mendapatkan dukungan terhadap *one China principle* ini datang dari Partai Kuomintang dan pengusaha Taiwan yang berasaskan konsensus 1992.

Keywords

China, One China Principle, Public Diplomacy, Taiwan

Article History

Received January 6, 2021

Revised February 9, 2021

Accepted April 23, 2021

Published April 26, 2021

Corresponding Author

Rizal Budi Santoso
Jl. Marjuk, Gg. Marjuk Rt01
Rw05 Kel. Pasirkaliki, Kec
Cicendo, Bandung Jawa Barat
Kode Pos 40171
082219325484

Pendahuluan

Sebagai upaya untuk menghadirkan pemaparan yang komprehensif terkait diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan, diperlukan penggalian yang mendalam terhadap catatan sejarah yang menjadi fondasi dasar dalam menjelaskan interaksi antara Cina dan Taiwan. Diawali dengan kekalahan Kuomintang (KMT) dalam perang saudara terhadap Partai Komunis Cina (PKC) yang memaksa KMT dengan para pendukungnya yang diperkirakan berjumlah 1 juta orang pindah ke pulau Taiwan (Wang, 2014). Sejak saat itu, hadir lah larangan dari Pemerintah Taiwan untuk berinteraksi dengan Cina melalui penerbitan undang-undang. Namun, pada tahun 1987 Pemerintah Taiwan melegalkan interaksi dengan Cina dengan mencabut undang-undangnya yang mengizinkan publik Taiwan untuk mengunjungi kerabat dan keluarganya yang berada di Cina ataupun untuk berkunjung ke kota kelahirannya (Lin, 2016).

Terbukanya pintu relasi sosial diantara publik kedua belah pihak telah menciptakan peningkatan interaksi lebih lanjut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Jiang (2017) memaparkan bahwa peningkatan interaksi ini juga menciptakan masalah seperti penyelundupan, sengketa penangkapan ikan, dan penyeberangan perbatasan secara ilegal yang perlu diselesaikan segera oleh Cina dan Taiwan. Karenanya pada tahun 1991, Taiwan dan Cina mendirikan organisasi semi resmi,

yaitu *Straits Exchange Foundation* (SEF) dari Taiwan dan *the Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS) dari Cina untuk melakukan kontak terbatas dan membangun koordinasi dalam menangani masalah perbatasan. Pada tahun 1992 SAF dan ARATS mengadakan KTT non-politik yang menghasilkan kesepakatan mengenai *one China principle* meskipun dengan perbedaan interpretasi dari kedua pihak. Kesepakatan tersebut lebih dikenal dengan “Konsensus 1992”. Poin terpenting dari Konsensus 1992 ini adalah bahwa Taiwan dan Cina sepakat bahwa hanya ada satu Cina tetapi juga setuju bahwa masing-masing pihak dapat memiliki interpretasi sendiri tentang apa arti “*one China*” berdasarkan *one China principle* sehingga mereka dapat terus melakukan pekerjaan fungsional tanpa dipengaruhi oleh kontroversi tentang kedaulatan.

Hal ini sejalan dengan pemaparan Kang (2003) mengenai karakteristik dari *one China principle* dari pemerintah Cina adalah “hanya ada satu Cina di dunia dan Taiwan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Cina, dan pusat pemerintahan Cina adalah di Beijing”. Atas dasar tersebut, Cina bersikeras bahwa penyatuan kembali hanya dapat dilakukan ketika Taiwan menerima status otonomi khusus dari Cina yang disebut “*one country, two systems*”. Sementara itu, dalam pandangan Taiwan mengenai *One China* merupakan suatu kondisi untuk masa depan yang artinya belum dapat ditentukan kepastiannya. Hal ini dikarenakan Cina masih terbagi antara *People’s Republic of China* dan *Republic of China* (Taiwan). Sementara itu, Taiwan juga menegaskan bahwa *Republic of China* merupakan entitas politik yang mempunyai status yang setara dengan status dari *People’s Republic of China* dan penyatuan kembali hanya dapat dicapai melalui cara damai dan pada saat sistem pemerintahan di Cina berubah menjadi demokrasi.

Penerapan diplomasi yang dilakukan oleh Cina sebagai upaya penyatuan kembali dengan Taiwan merupakan langkah yang krusial untuk menghindari penggunaan militer mengenai permasalahan Cina dengan Taiwan. Publik Taiwan bagi Cina merupakan publik asing karena wilayah Taiwan itu sendiri memiliki pemerintahan, rakyat, wilayah dan kedaulatannya sendiri. Karenanya akan sangat sulit bila Cina memaksa untuk membawa Taiwan kembali bergabung dengan Cina meskipun dengan menggunakan kekuatan militer. Terlebih sulitnya Cina melakukan interaksi dengan Taiwan dengan model *government-to-government*. Karenanya Cina menargetkan publik Taiwan sebagai target diplomasi publiknya dengan cara memulai komunikasi baik secara *government-to-people* ataupun *people-to-people*.

Penelitian mengenai penggunaan diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan belum banyak dikaji. Penelitian terdahulu yang terkait dibagi kedalam beberapa kategori yang sebagian besar membahas tentang hubungan Cina dengan Taiwan, praktik diplomasi publik Cina, diplomasi publik Cina terhadap Taiwan. Kategori pertama merupakan penelitian terdahulu mengenai hubungan Cina dan Taiwan khususnya dalam sektor ekonomi melalui perdagangan dan investasi (Lee & Yin, 2017; Y. Lin & Hsieh, 2016; Matsuda, 2015; Weng, 2017). Interaksi ekonomi dalam hubungan lintas-selat telah menguat secara signifikan dengan disepakatinya *the Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) pada tahun 2010, yang kemudian menjadi tonggak penting dari perkembangan ekonomi lintas-selat yang dapat berkembang menjadi perjanjian perdagangan bebas lintas-selat.

Kategori kedua merupakan penelitian terdahulu mengenai praktik diplomasi publik Cina (Hartig, 2015; Lan, 2017; Rawnsley, 2012; Theo & Leung, 2018). Dalam melakukan praktik diplomasi publik, Cina mendirikan pusat budaya dan Bahasa, Konfusius Institut, yang bertugas untuk menyebarkan budaya dan bahasa Cina ke seluruh dunia. Konfusius Institut ini merupakan salah satu instrumen diplomasi publik Cina dalam memberikan pemahaman mengenai Cina yang sebenarnya sehubungan dengan permasalahan dalam negeri Cina agar persepsi mengenai perilaku internasional Cina ini dapat berubah terutama mengenai hak asasi manusia dalam permasalahan Tibet, Xinjiang, dan Hongkong. Kategori yang ketiga adalah penelitian terdahulu mengenai diplomasi publik Cina terhadap Taiwan (Hung, 2017; Santoso, Surya, Hidayat, & Dermawan, 2020). Diplomasi publik Cina berisi elemen komunikasi timbal balik untuk mendorong pertukaran dalam hal ekonomi dan sosial. Diplomasi publik Cina terhadap Taiwan ini juga seringkali

menggunakan imbalan ekonomi dalam menarik hati dan pikiran dari publik Taiwan untuk dapat mempengaruhi elit politik Taiwan dalam tindakannya terkait dengan Cina.

Tiga kategori penelitian terdahulu mengenai diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan telah memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen ekonomi telah memberikan dampak pada hubungan sosial publik Cina dengan Taiwan. Artinya adalah pemaparan penelitian terdahulu secara umum bermuara pada instrumen ekonomi dari diplomasi publik Cina. Secara khusus penelitian terdahulu belum membahas mengenai penggunaan diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam mendukung *one China principle*. Dalam tema yang diangkat ini, selain untuk mengisi kekosongan literatur seperti yang telah disebutkan diatas, juga memiliki urgensi untuk melihat bagaimana sebuah praktik dari diplomasi publik mampu mengambil peran dalam upaya penyelesaian masalah kedaulatan diantara dua entitas yang meyakini identitas dan kedaulatannya masing-masing, terutama dengan cara-cara perdamaian dimana model penggunaan kekuatan militer merupakan opsi yang paling tidak diharapkan dan model diplomasi *government-to-government* tidak menunjukkan efektifitasnya.

Atas dasar tersebut, tulisan ini mengangkat pertanyaan “bagaimana diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam mendukung *one China principle*?”. Guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, tulisan ini menggunakan konsep diplomasi publik sebagai alat analisis. Secara umum, terdapat cukup banyak upaya pendefinisian mengenai apa itu diplomasi publik. Edmund Gullion pertama kali memperkenalkan konsep diplomasi publik yang didefinisikan sebagai “proses yang berkaitan dengan pengaruh sikap publik terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri (Cull, 2009)”. Menurut Hans Tuch, definisi diplomasi publik adalah “proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya mewujudkan pemahaman tentang gagasan dan cita-cita nasional, lembaga dan budayanya, serta tujuan nasional dan kebijakan saat ini (Tuch, 1990)”. Berbagai macam metode yang ada melalui mana kepentingan nasional ditransmisikan kepada publik asing, seperti acara budaya, pertukaran pendidikan, siaran internasional, dan interaksi akademik, konferensi, dan publikasi.

Penting juga untuk memahami bahwa diplomasi publik hanya berfungsi dalam dua arah, yang dengannya diplomasi publik dipahami sebagai “proses di mana hubungan langsung dengan orang-orang di suatu negara diupayakan untuk memajukan kepentingan dan memperluas nilai-nilai mereka yang diwakili (D’Hooghe, 2011)”. Definisi ini melampaui diplomasi tradisional yang menggambarkan diplomasi publik sebagai proses komunikasi yang berpusat pada negara dengan audiens asing. Dengan kata lain, diplomasi publik adalah proses di mana pemerintah suatu negara memengaruhi opini publik di negara lain untuk mengubah kebijakan negara yang dituju menjadi menguntungkan.

Cull (2009) menambahkan bahwa diplomasi publik dapat digambarkan sebagai keterlibatan dan komunikasi suatu negara dengan publik asing demi mengomunikasikan narasi dan gambaran tertentu dari negara tersebut, yang terkait dengan kepentingan nasional. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut termasuk mendengarkan dan advokasi, penyiaran internasional dan pertukaran internasional, diplomasi budaya, dan aspek komunikasi strategis lainnya seperti perang media / psikologis. Sementara Jan Melissen menegaskan bahwa diplomasi publik “ditujukan untuk publik asing, dan strategi untuk berurusan dengan publik seperti itu harus dibedakan dari sosialisasi diplomasi dalam negeri” (Melissen, 2005). Publik dipandang sebagai target dan instrumen kebijakan luar negeri dan upaya untuk menargetkan publik secara lebih efektif (Hocking, 2005). Dalam bentuk diplomasi publik tradisional ini, sifatnya lebih kompetitif dimana kebijakan merupakan bagian dari strategi diplomasi bilateral, yang melayani kepentingan nasional dan yang bersaing dengan strategi negara lain (Pamment, 2013).

Leonard (2002) telah mengkategorikan kegiatan diplomasi publik kedalam tiga dimensi. Pertama, *news management* yang bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa dalam berita yang terjadi dengan cara yang sesuai dengan tujuan strategis sebuah negara. Kedua, *strategic communications* yang secara proaktif membuat agenda berita melalui kegiatan dan acara yang dirancang untuk

memperkuat pesan inti dan mempengaruhi persepsi publik asing. Ketiga, *relationship building* yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan individu-individu atau kelompok-kelompok kunci melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, membangun jaringan nyata dan virtual, dan memberi orang akses ke saluran media.

Tiga dimensi diplomasi publik yang dinyatakan oleh Leonard (2002); *news managemet, strategic communications*, dan *relationship building* akan digunakan sebagai panduan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Cina. Sebagai bentuk persuasi terhadap publik Taiwan, Cina menjalin hubungan baik dengan Partai Kuomintang (PKC) dan kelompok pengusaha asal Taiwan yang memiliki bisnis di Cina secara jangka Panjang, dengan tujuan utama untuk mendukung *one China principle*. Disisi lain, hubungan baik yang dibangun oleh Cina ini seringkali membawa pesan-pesan strategis Cina yang disiarkan melalui media-media di Taiwan yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut. Berangkat dari hal diatas, konsep yang dikemukakan oleh Leonard tersebut tentunya relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian berikutnya tulisan ini akan memaparkan metode penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang analisis dari diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan sebagai upaya untuk mendukung *one China principle*. Bagian akhir ialah kesimpulan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik atau strategi pengumpulan dan analisis data mengandalkan pengumpulan dan analisis data non-numerik. Menurut Lamont (2015), metode kualitatif digunakan untuk lebih memahami bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita, dan dengan demikian mengharuskan kita untuk fokus pada makna dan proses yang membentuk politik internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur pada jurnal ilmiah, buku, laporan, media cetak dan publikasi data, dengan penelusuran berbasiskan pada internet yang berkaitan dengan teori diplomasi publik dan data mengenai diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam upaya untuk mendukung *one China principle*. Rentang waktu pengumpulan data dalam analisis penelitian adalah pada 2016-2019. Metode triangulasi data digunakan untuk menilai validitas data yang dikumpulkan.

Pembahasan

Perumusan *one China principle* merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) kepada pemerintah semua negara di dunia, “Pemerintah ini adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh rakyat Republik Rakyat Cina. Pemerintah siap menjalin hubungan diplomatik dengan semua pemerintah asing yang bersedia mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati untuk integritas dan kedaulatan wilayah masing-masing” (Jiang, 2017). Tak lama setelah itu, Pemerintah Cina mengirim telegram ke PBB, mengumumkan bahwa pihak berwenang KMT telah “kehilangan semua basis, baik *de jure* dan *de facto*, untuk mewakili rakyat Cina”, dan karena itu tidak memiliki hak untuk mewakili Cina sama sekali. Salah satu prinsip yang mengatur pembentukan hubungan diplomatik Cina dengan negara asing adalah bahwa ia mengakui pemerintah RRC sebagai satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh Cina, menutup atau menahan diri dari membangun hubungan diplomatik dengan pihak berwenang Taiwan.

One China principle adalah batu fondasi bagi Pemerintah Cina dalam membuat kebijakan mengenai Taiwan. Sejak 1979, pemerintahan Deng Xiaoping telah mengadopsi kebijakan penyatuan kembali secara damai dan secara bertahap mengembangkan konsep “*one country, two systems*”. *one China principle* pada dasarnya mengacu pada prinsip dasar “reunifikasi damai, dan *one country, two systems*”. Poin utama dari prinsip dasar ini dan kebijakan yang relevan adalah Cina akan melakukan yang terbaik untuk mencapai penyatuan kembali secara damai, tetapi tidak akan berkomitmen untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan; akan secara aktif mempromosikan pertukaran *people-to-people* dan pertukaran ekonomi dan budaya antara kedua sisi Selat Taiwan, dan

memulai perdagangan langsung, layanan pos, udara dan pengiriman sesegera mungkin, mencapai penyatuan kembali melalui negosiasi damai dan, berdasarkan *one China principle*, masalah apa pun dapat dinegosiasikan.

Dreyer (2008) menilai bahwa Jika Taiwan selalu menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina, maka pastinya pemerintah Republik Rakyat Cina memiliki hak untuk “menyatukan kembali” wilayah Taiwan dengan Republik Rakyat Cina, meskipun Republik Rakyat Cina tidak pernah menggunakan otoritas apa pun atas Taiwan. Dengan demikian, *one China principle* mendasari klaim kuat terhadap Taiwan yang luas, jika tidak secara universal, diakui oleh komunitas internasional.

Menurut Huang (2017), Presiden Xi Jinping telah mengajukan beberapa persyaratan politik khusus untuk interaksi dengan Taiwan, termasuk memperkuat *confidence building*, mempromosikan interaksi positif, mengoptimalkan kepentingan bersama, dan bersikap pragmatis. Esensinya, Presiden Xi Jinping menekankan, untuk mengkonsolidasikan dan melindungi kemajuan strategis Republik Rakyat Cina berdasarkan *one China principle*, yang harus disepakati dalam hubungan lintas-Selat. Xi mengemukakan gagasan bahwa “kedua sisi Selat merupakan satu keluarga”. Saat Xi menekankan, kedua belah pihak harus menghargai kesempatan historis ini, mempertahankan momentum pengembangan hubungan damai di Selat Taiwan, dan memperkuat rasa saling percaya politik, sehingga meletakkan fondasi politik.

***Relationship Building* Diplomasi Publik Cina Melalui Forum PKC-KMT**

Dengan adanya *one China principle* ini, Cina menyadari bahwa *relationship building* merupakan hal yang krusial dalam pemeliharaan hubungan positif dalam struktur sosial dengan publik Taiwan untuk menyelesaikan masalah komunikasi demi memajukan tujuan politik. Dalam konteks *relationship building* menurut Leonard (2002), ini memandang komunikasi sebagai masalah hubungan, baik hubungan yang tegang ataupun dalam kerenggangan. Dalam menyelesaikan masalah komunikasi ini haruslah menemukan sumber ketegangannya terlebih dahulu dan berusaha menyembuhkan, melindungi, dan menjaga hubungan agar dapat segera memulihkan harmonisasi dalam berinteraksi.

Relationship building dalam diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan sebagian besar berada pada *level platform the party-to-party* antara Partai Komunis Cina dengan Kuomintang. Pada tahun 2005, ketika hubungan Cina dengan Taiwan turun ke titik terendah sepanjang masa selama pemerintahan *Democratic Progressive Party* (DPP), ketua kehormatan Kuomintang (KMT), Lien Chan, memimpin delegasi KMT untuk mengunjungi Cina. Mereka mengadakan pertemuan resmi dengan Partai Komunis Cina (PKC), termasuk dengan Hu Jintao. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan dengan level tertinggi pasca perang saudara tahun 1945. Setelah pertemuan itu, KMT mengumumkan lima poin kompromi:

1. Baik PKC dan KMT setuju untuk mendukung “konsensus 1992”.
2. Untuk mengakhiri permusuhan di Selat Taiwan dan mempromosikan perjanjian perdamaian.
3. Untuk membangun mekanisme untuk mempromosikan kerja sama ekonomi.
4. Untuk mempromosikan negosiasi tentang partisipasi internasional Taiwan
5. Untuk membentuk platform komunikasi KMT-PKC Forum yang bersifat *the party-to-party* untuk dialog di masa depan (Beckershoff, 2014:214).

Relationship building sebagai fondasi yang lebih kuat, entitas politik seringkali dapat memajukan tujuan politiknya dengan lebih mudah dan menonjolkan hubungan yang positif. *Relationship building* ini dapat tercermin dalam forum yang dibentuk oleh kedua partai yang berdasarkan *platform the party-to-party*. Pada awal pembentukannya, *platform* ini terdiri dari dua forum, masing-masing bergantian lokasi antara Cina dan Taiwan: forum lintas-selat ekonomi, perdagangan dan budaya, yang akhirnya dilaksanakan, dan forum perdamaian lintas selat, yang seharusnya membahas masalah politik. Forum Perdamaian pertama akan diadakan di Taiwan, tetapi karena otoritas Taiwan menolak aplikasi *National Policy Foundation* (NPF) untuk mengundang delegasi

Cina, gagasan itu dibatalkan dan hanya forum ekonomi, perdagangan dan kebudayaan yang dipertahankan (Beckershoff, 2014:220-221).

Bagi peneliti, *relationship building* yang dibentuk antara PKC dengan KMT merupakan tahapan awal menuju kampanye politik melalui *strategic communications* dan *news management*, yang lebih jauh bertujuan meningkatkan hubungan dan interaksi ekonomi dan sosial melalui pengembangan kebijakan Cina terhadap Taiwan, agar dapat mendukung *one China principle*. Pernyataan peneliti ini didukung oleh pernyataan dari Lin (2019) yang melihat bahwa kepemimpinan Presiden Ma Ying-jeou selama periode 2008-2016 telah menunjukkan kepercayaannya yang tumbuh dalam situasi yang berkembang baik di dalam dan di sekitar Taiwan. Penerimaan pemerintahan Ma atas konsensus 1992 dan kesediaannya untuk menormalkan hubungan lintas-Selat Taiwan tanpa de-Signifikasi telah membebaskan Cina dari konflik dengan Taiwan sejak era pemerintahan Chen Shui dan Lee Teng-hui dari DPP, yang keduanya mempunyai arah kebijakan untuk merdeka dari Cina. Perubahan kebijakan di pihak Taiwan, dari perspektif Cina, berasal dari pengalaman panjang konfrontasi melawan Cina sebelum 2008 seperti isolasi secara diplomatik dalam dunia internasional. Hal ini juga dibentuk oleh peningkatan keunggulan komparatif yang didapat oleh Cina dalam hal pertumbuhan ekonomi dan integrasi dengan pasar global.

Salah satu momen paling penting dalam interaksi KMT dengan PKC ini terjadi pada tahun 2015 dimana dilakukan pertemuan antara pemimpin partai di Singapura, KMT diwakili oleh Ma Ying-jeou, sementara PKC diwakili oleh Xi Jinping. Meskipun dalam pertemuan ini tidak menghasilkan perjanjian formal, namun Cina berhasil memberikan pesan kepada dunia dengan menunjukan inisiatif dalam membangun perdamaian dengan berbagai pihak termasuk Taiwan.

Relationship building melalui Forum PKC dan KMT ini, merupakan bentuk dari jaringan aktor politik yang membentuk saluran komunikasi dan kerjasama lebih lanjut tanpa adanya perjanjian formal antara kedua pemerintah. Dalam konteks diplomasi public, Tindakan yang telah diambil oleh PKC dan KMT telah dapat dikategorikan sebagai upaya atau tindakan "*relationship building*" yang didasarkan pada kebutuhan yang sama menunjukkan berkembangnya komunikasi dan kebersamaan. Untuk melaksanakan hasil negosiasi, Forum PKC-KMT menggunakan dua instrumen utama, yang disebut "rekomendasi bersama (*joint recommendations*)" (atau proposal bersama) dan langkah-langkah sepihak (atau kebijakan unilateral (*unilateral policies*)). Selain itu, kunjungan provinsi juga dianggap sebagai perpanjangan dari Forum. Rangkaian praktik spesifik ini berasal dari keadaan historis dan sosial-politik di mana forum muncul dan dapat dikaitkan dengan karakter transnasional dari pengaturan tersebut.

Dalam pandangan peneliti, *relationship building* melalui forum PKC-KMT yang dilakukan oleh Cina terhadap publik Taiwan dalam *platform the party-to-party* telah memenuhi syarat dalam pembangunan hubungan dan menumbuhkan kepercayaan yang kuat demi mendukung *one China principle*. *Relationship building* secara tradisional telah dilihat sebagai proses yang harus dilakukan tatap muka dan pada tingkat pribadi. Instrumen yang paling efektif untuk membangun hubungan yang positif adalah melalui kunjungan dan program pertukaran lainnya yang memerlukan perencanaan dan administrasi yang detail, panjang dan disertai dengan biaya satuan yang tinggi.

Program pertukaran ini dapat dilihat pada tahun 2016 melalui pertemuan antara KMT yang diwakili oleh Hung Hsiu-chu dengan PKC yang diwakili oleh Yu Zhengsheng di Beijing, Cina (Xiaowei & Baiting, 2016). Pertemuan ini membuat beberapa proposal, termasuk proposal yang keduanya harus mematuhi konsensus 1992 dan menentang kemerdekaan Taiwan. Selain itu pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan interaksi ekonomi, seperti industri dermaga dan pelabuhan, serta merilis informasi tentang lebih dari 40 proyek pertukaran di tahun 2017. Sementara untuk interaksi sosial dalam interkoneksi infrastruktur dan transportasi dalam mempromosikan pertukaran *people-to-people* antara Cina dan Taiwan khususnya anak muda, dan mencari model-model baru dalam industri film dan televisi. Meskipun

KMT menjadi oposisi pemerintahan setelah pada pemilihan presiden dan legislatif dikalahkan oleh DPP, KMT tetap menjalankan pertemuan dengan PKC.

Pada tahun 2017, proyek kerja sama riset lintas-selat ilmiah, “*National Science Foundation of the Mainland and Fujian Province*” bersama-sama mendirikan “Dana Sains untuk Kerjasama Lintas-Selat Sains dan Teknologi”, yang akan menginvestasikan uang sebesar RMB 48,75 juta yang dimulai pada tahun 2018 (Xiaowei & Baiting, 2016). Pemberian dana ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi diantara mahasiswa Cina dengan Taiwan dalam proyek pembuatan aplikasi. Forum KMT-PKC ini juga memfasilitasi anak muda Cina dan Taiwan untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan menyediakan proyek inovasi kewirausahaan untuk pemuda Cina dan Taiwan, pertukaran program magang di perusahaan Cina dan Taiwan, dan mendorong para sarjana Cina dan Taiwan untuk melakukan riset bersama. Kolaborasi antar individu ini telah menjadi alat yang efektif dalam diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan khususnya bagi pelajar Taiwan dalam membentuk hubungan yang kuat diantara sesama pelajar. Cina juga mengundang mahasiswa Taiwan untuk magang di Institut Akademi Ilmu Pengetahuan Cina melalui “Proyek Tai Ching” selama 6 sampai 12 bulan untuk kolaborasi riset.

Melalui forum KMT-PKC ini juga mempromosikan pertukaran lintas selat *city-to-city* antara Taipei dengan Shanghai yang pertama kali di lakukan pada tahun 2010. Pada 2018, pertukaran lintas selat *city-to-city* kembali dilakukan di Taipei. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh wakil walikota Shanghai, Zhou Bo dengan membawa 135 orang delegasi yang terdiri dari akademisi, perwakilan industri, dan pejabat kota. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh walikota Taipei Ko Wen-je berfokus pada masalah ekonomi. Dalam forum *Twin City* ini, kedua pihak memegang teguh prinsip kesetaraan dan berfokus pada pertukaran ekonomi, budaya dan sosial (Pei-chih, Tsung-han, & Huang, 2018).

Pertukaran lintas selat *city-to-city* difokuskan pada perdagangan produk pertanian dan perikanan dari Taipei ke Shanghai, promosi pariwisata dan menarik investasi (Aspinwall, 2018). Shanghai juga mempresentasikan rencananya untuk memposisikan kota Shanghai sebagai pusat global di sektor keuangan, perkapalan, dan teknologi inovasi pada tahun 2035 dan menantikan Taipei dan mitranya untuk berbagi pengalaman dan bekerjasama dalam pembangunan perkotaan (Pei-chih et al., 2018). Pertukaran tingkat kota memungkinkan pemerintah kota untuk memotong sentimen tingkat nasional terkait isu anti Cina dan menguatkan hubungan dengan Cina sebagai mitra dagang individu terbesar di Taiwan. Pertemuan ini juga kemudian menargetkan pembahasan yang lebih luas dalam beberapa hal seperti pengembangan budaya, perlindungan lingkungan, dan renovasi kota, serta kedua kota juga akan menandatangani tiga nota kesepahaman baru tentang kerja sama.

Peneliti melihat bahwa pertukaran yang dilakukan oleh Cina dengan publik Taiwan ini baik yang berupa riset bersama, proyek pembangunan, pertukaran *people-to-people*, dan kerjasama *city-to-city* melalui forum PKC-KMT ini merupakan bentuk *relationship building* yang kuat dengan komunikasi interpersonal antara Cina dengan publik Taiwan. Dalam *relationship building*, komunikasi interpersonal merupakan media yang paling ideal meskipun bukan media paling efisien, tetapi menjadi media yang paling efektif dan disukai untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Forum PKC-KMT memunculkan kredibilitas dan beresonansi positif dengan sifat partisipatif antar Cina dengan publik Taiwan. Tujuan yang sama ini membawa perspektif dan saran yang baru dan berbeda, menciptakan lingkungan yang ideal untuk kerjasama yang efektif dalam komunikasi dan membangun kepercayaan bersama.

Dalam perspektif diplomasi publik, peran yang dimainkan oleh PKC sebagai aktor negara yang dapat melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan KMT dalam menanggapi isu-isu tertentu mengenai hubungan Cina dengan Taiwan. Diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam forum PKC-KMT secara tradisional merupakan serangkaian kegiatan untuk membangun *relationship building* yang kuat dengan diawali dengan menemukan kesamaan dan kepentingan bersama antar pihak demi memajukan kepentingan politik

bersama, yaitu penyatuan kembali antara Cina dengan Taiwan. Posisi KMT pada tahun 2016-2018 ini merupakan *non-state actor*, dimana menjadi oposisi pemerintahan yang dipimpin oleh Tsai Ing-wen dari DPP, karenanya forum ini merupakan mekanisme *government-to-people*.

Diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam *relationship building* yang mengarah ke koordinasi yang mengandalkan strategi *relationship building* dimana dengan bekerja antar pihak dalam mendefinisikan, merancang, mengimplementasikan, dan memonitor program pertukaran untuk membangun hubungan yang kuat dengan publik Taiwan khususnya KMT yang didasarkan pada kebersamaan dan timbal balik. Para pihak ikut serta dalam menentukan dan mengendalikan aspek-aspek program. Grunig dan Hon (1999) menyebut ini “kontrol mutualitas”. Persyaratan ini digemakan dalam literatur diplomasi publik dalam deskripsi mutualitas dan pembangunan kepercayaan, perencanaan bersama untuk keuntungan bersama.

Dalam pandangan peneliti, diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam *relationship building* ini dapat mengubah perilaku dari publik Taiwan khususnya Partai KMT dan para pendukungnya. *Relationship building* yang dilakukan oleh Pemerintah Cina ini merupakan upaya pendekatan secara damai yang dilandasi dengan adanya kebutuhan dan kepentingan bersama berdasarkan *one China principle*. Selain itu upaya ini dapat dipandang secara spesifik sebagai cara untuk membentuk opini publik Taiwan agar meninjau dan merekonstruksi kembali kebijakan mengenai Cina selama masa pemerintahan Presiden Ma serta keterlibatan KMT itu sendiri. Akhirnya tujuan adanya forum PKC-KMT ini bukan untuk melakukan persuasi bagi Cina, melainkan untuk membangun dan memelihara kembali hubungan antara PKC dan KMT agar menciptakan rasa saling percaya berdasarkan *one China principle*.

News Management dan Strategic Communications Diplomasi Publik Cina terhadap Publik Taiwan

Hubungan media adalah aspek penting dari inisiatif berbasis informasi karena pemerintah atau entitas politik harus mengandalkan apa yang pada dasarnya adalah perantara pers dan media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Kegiatan yang membantu memfasilitasi akses media ke informasi dan distribusi informasi termasuk melakukan briefing pers dan konferensi pers, memberikan wawancara, mengajukan pertanyaan dan permintaan media, dan menyebarkan siaran pers dan dokumen lainnya (Zaharna, 2010).

Bagi Cina, menggunakan media masa untuk melakukan *news management* dalam memproyeksikan citra nasionalnya agar dapat meningkatkan pengaruh globalnya dan menunjukkan perilaku yang menjaga perdamaian sebagai salah satu dari kekuatan global. Dalam konteks diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan entitas swasta dari Taiwan. Di Taiwan, Cina menggunakan pengusaha Taiwan sebagai sarana dalam melakukan *news management* dan *strategic communications*.

Want Want Holdings Limited adalah contoh utama dari jenis kegiatan *news management* dan *strategic communications* ini. *Want Want Holdings Limited (Want Want Holdings)* dimulai sebagai perusahaan makanan Taiwan yang memproduksi makanan ringan dan minuman. Perusahaan berinvestasi di Cina pada tahun 1992. Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan ini telah meraup untung besar dalam industri makanan. Setelah rekonsiliasi Cina dan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Ma tahun 2008, pemilik *Want Want Holdings*, Tsai Eng-Meng, membeli perusahaan media Taiwan yang berpengaruh, *China Times Group*, dan stasiun televisi afiliasinya, termasuk *China Times*, *the Commercial Times*, *China Times Weekly*, *CTI Television*, dan *the China Television Company*. Tsai menggabungkan *Want Want Holdings* dan *China Times Group* menjadi *Want Want China Times Media Group (Want Want China Times)*, dan pada tahun 2009 mulai menerbitkan *Want Daily*, sebuah surat kabar yang terutama meliput berita mengenai Cina dan hubungan Cina dengan Taiwan sambil berusaha mendorong orang Taiwan untuk belajar tentang Cina “dengan benar”.

Menurut Leonard (*et al*, 2002) *News management* dalam hal ini merupakan manajemen komunikasi pada masalah sehari-hari yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan untuk

menyelaraskan komunikasi dengan diplomasi tradisional melalui media. *Strategic communications* merupakan serangkaian kegiatan yang lebih mirip kampanye politik yang menetapkan sejumlah pesan strategis, dan merencanakan serangkaian kegiatan selama setahun atau lebih untuk memperkuatnya.

Diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam mendukung *one China principle* ini melalui *news management* dan *strategic communications* seringkali dilakukan secara bersamaan dengan memanfaatkan media-media yang dimiliki oleh Tsai Eng-meng. Hioe (2019) menyatakan bahwa, *CTI News* yang merupakan anak perusahaan dari *Want Want China Times Media Group* menjadi media Taiwan yang seringkali memberikan berita yang mendukung Taiwan untuk bergabung kembali dengan Cina. Seperti pada Mei 2018 *CTI News* melakukan siaran berita dengan peta Cina dan Taiwan yang di lapiasi warna bendera Cina sebagai latar belakang berita dengan memberikan judul “*Look at New China*”. Hal ini kemudian memancing kemarahan masyarakat Taiwan dengan melaporkan kejadian tersebut kepada *the National Communications Commission* (NCC) dengan mengatakan bahwa peta tersebut tidak mencerminkan situasi politik aktual dan bahwa *CTI News* menyajikan pandangan yang bias.

CTI News ini memiliki sudut pandang yang memang mengarah pada upaya untuk mendukung *one China principle* dan menjadi aktor utama dalam melakukan *news management*. Menurut Hioe (2019), *CTI News* ini membayar sejumlah kafe dan restoran yang ada di Taiwan untuk menayangkan siaran *CTI News* tanpa henti untuk memastikan bahwa sudut pandang politik *CTI News* ini tersebar di kalangan publik Taiwan. Pada September 2018, NCC mengirim surat kepada *CTI News* untuk mengadakan pertemuan komite disiplin dan etika internal yang mengarah pada upaya pemeriksaan eksternal. NCC juga mengindikasikan pada saat itu bahwa mereka akan menggunakan kasus ini sebagai referensi untuk evaluasi *CTI News* di masa depan. Selain itu juga *CTI News* memberikan berita mengenai kegagalan dari pemerintahan Tsai Ing-wen, dengan tujuan untuk merusak reputasi pemerintahan Tsai dan secara politis mendukung KMT. Demikian juga dengan pemberitaan dari walikota Kaohsiung, Han Kuo-yu dari KMT.

Selain itu, *News management* yang dilakukan Cina kepada media-media Taiwan ini juga bertujuan membangun *strategic communications* dalam kampanye politik untuk mendukung *one China principle*. Dalam wawancara *Financial Times* dengan jurnalis yang bekerja di *China Times* dan *CTI Televisions* mengatakan bahwa manajer editorial selalu menerima instruksi langsung dari Kantor Urusan Taiwan (*the Taiwan Affairs Office*), yang merupakan sebuah badan dari pemerintah Cina yang menangani masalah Taiwan. Pejabat pemerintahan Cina akan mengatur liputan mengenai Cina dengan menugaskan cerita dan posisi editorial kepada koresponden media Cina yang berbasis di Cina (Hille, 2019). *The Taiwan Affairs Office* pada 2018 membayar 30.000 yuan (\$ 4.300) kepada lima media Taiwan untuk dua berita mengenai upaya Cina dalam mempromosikan insentif ekonomi yang disediakan oleh pemerintah Cina untuk menarik pebisnis Taiwan menanamkan modalnya di Cina. Menurut laporan itu, TAO menelepon harian *China Times* untuk mengatur hal tersebut termasuk penempatan berita pada halaman depan. TAO pada dasarnya tidak ikut campur dalam semua pemberitaan, tetapi hanya dengan berita yang berkaitan dengan hubungan Cina dan Taiwan.

Upaya Cina mempengaruhi publik Taiwan melalui *news management* ini kembali berlanjut pada pemilihan presiden Taiwan tahun 2020. Menurut Hioe (2019) pada 17 Februari 2019, 57% dari semua berita utama, ditemukan pemberitaan tentang Han Kuo-yu (calon presiden dari KMT). *CTI News* bahkan juga didenda 400.000 NT karena mengeluarkan cerita yang mengklaim bahwa adanya “awan keberuntungan” berbentuk seperti burung “*phoenix*” telah muncul di atas acara yang dihadiri oleh Han, bersama dengan sesama walikota KMT Lu Shiow-yen dan Hou You-yi. Burung “*Phoenix*” dalam kepercayaan kultural masyarakat Cina diartikan sebagai makhluk mitologi yang memiliki banyak arti simbolik, salah satu yang utamanya adalah sebagai simbol kehangatan, kedamaian dan kemakmuran. Burung ini juga diyakini hanya hadir dan menunjukkan dirinya pada kekuasaan yang dipegang penguasa yang berbudi luhur (Robert, 2010). Pemberitaan terkait hadirnya awan keberuntungan berbentuk burung “*Phoenix*” ini jelas memiliki tujuan untuk

mempopulerkan tokoh-tokoh KMT, yang tentu saja diharapkan membawa keuntungan bagi KMT, serta juga Cina disisi lain yang memiliki hubungan yang cukup kuat dengan KMT.

Hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam upaya untuk mendorong *one China principle*, Cina menggunakan disinformasi baik dalam pemilihan lokal pada tahun 2018, maupun pemilihan presiden pada Januari 2020. Dengan hubungan yang baik dengan KMT saat ini tentu saja akan memberikan keuntungan bagi Cina terhadap *one China principle* apabila KMT menjadi partai penguasa kembali. *Strategic communications* yang disisipkan dalam *news management* merupakan upaya disinformasi untuk mempengaruhi pemilih dari publik Taiwan yang menjadi salah satu bagian dari kampanye politik pemerintah Cina dengan KMT. Secara lebih umum, Cina menggunakan *strategic communications* disinformasi untuk melemahkan publik Taiwan, termasuk dengan melemahkan institusi Taiwan, membuang kepercayaan publik pada para pemimpinnya, menurunkan moral warganya, dan menyebabkan kebingungan.

Dengan terjalannya *strategic communications* antara Pemerintah Cina dengan sektor swasta Taiwan, dalam contoh kasus adalah *Want Want China Times Media Group* telah menimbulkan efek diplomasi publik yang dilakukan oleh *Want Want China Times Media Group* melalui media-media yang dimilikinya. Secara diplomasi publik Cina melalui *news management* dalam pemberitaan yang dilakukan oleh media yang dimiliki *Want Want China Times Media Group* telah memberikan dampak atau telah mempengaruhi publik Taiwan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan yang dimiliki oleh Cina yang dianggap sebagai promosi dari kebijakan diplomasi publik Cina untuk mendukung *one China principle*. Aliran informasi melalui media masa yang dimiliki *Want Want China Times Media Group* pada dasarnya bersifat satu arah dari satu sumber komunikasi tunggal ke audiensi yang banyak. Audiens ini merupakan jaringan semua saluran untuk menyampaikan pesan dan informasi dari media masa. Kombinasi media massa dan jaringan semua-saluran audiens dapat memperkuat pesan media untuk mendukung *one China principle*.

Kesimpulan

Diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam mendukung *one China principle* ini secara aktif terus berupaya mempengaruhi dan membentuk opini dari publik Taiwan melalui *relationship building* yang dibangun melalui relasi antara PKC dengan KMT, dan telah memberikan harmonisasi kepada Cina dalam melakukan diplomasi publik kepada publik Taiwan sehingga KMT dapat mendukung *one China principle*. Sementara itu adanya pengusaha Taiwan yang sikap politiknya mengacu kepada Cina membuat Cina mendapatkan keuntungan dengan bekerjasama menyebarkan diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan. Dalam penelitian ini mengambil kasus *Want Want China Times Media Group* yang bekerjasama dengan pemerintah Cina dalam melakukan *news management* untuk membentuk persepsi dan opini publik Taiwan mengenai bagaimana setiap individu di Taiwan dapat memahami isu dan peristiwa sesuai dengan keinginan Cina. Selain itu dengan adanya sumber daya dalam hal media masa di Taiwan ini, Cina melakukan *strategic communications* melalui kampanye politik untuk mendukung KMT menjadi penguasa kembali di Cina.

Referensi

- Aspinwall, N. (2018). Taipei-Shanghai Forum Puts Ko Wen-je's China Views Into Focus. Retrieved November 16, 2019, from The Diplomat website: <https://thediplomat.com/2018/12/taipei-shanghai-forum-puts-ko-wen-jes-china-views-into-focus/>
- Beckershoff, A. (2014). The KMT-CCP Forum: Securing Consent for Cross-Strait Rapprochement. *Journal of Current Chinese Affairs*, 43(1), 213–241. <https://doi.org/10.1177/186810261404300108>
- Cull, N. J. (2009). Public Diplomacy before Gullion: The Evolution of a Phrase. In N. Snow & P.

- M. Taylor (Eds.), *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. New York: Routledge.
- D'Hooghe, I. (2011). The Expansion of China's Public Diplomacy System. In J. Wang (Ed.), *Soft Power in China, Public Diplomacy through Communication* (pp. 19–36). New York: Palgrave Macmillan.
- Dreyer, E. L. (2008). The Myth of “One China.” In P. C. Y. Chow (Ed.), *The One China Dilemma*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hartig, F. (2015). Communicating China to the World: Confucius Institutes and China's Strategic Narratives. *Politics*, 35(3–4), 245–258. <https://doi.org/10.1111/1467-9256.12093>
- Hille, K. (2019). Taiwan primaries highlight fears over China's political influence. Retrieved November 28, 2019, from Financial Times website: <https://www.ft.com/content/036b609a-a768-11e9-984c-fac8325aaa04>
- Hioe, B. (2019). The Return of Media Monopoly? Retrieved February 8, 2020, from newbloommag.net website: <https://newbloommag.net/2019/04/03/media-monopoly-return/>
- Hocking, B. (2005). Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy. In *The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations* (pp. 28–45). New York: Palgrave Macmillan.
- Hon, Linda C., & Grunig, James E. (1999). Guidelines for Measuring Relationships in Public Relations. Institute For Public Relations.
- Huang, J. (2017). Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework Chapter. In *Taiwan and China* (pp. 239–248). California: University of California Press.
- Hung, T.-C. (2017). *Rethinking Public Diplomacy: A Study of China Exerting its Influence on Taiwan by Tzu-Chieh Hung to A Thesis Submitted to the Graduate Scholl of Asian-Pacific Studies of Waseda University, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doc* (the Graduate Scholl of Asian-Pacific Studies of Waseda University). Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/159504351.pdf>
- Jiang, Y. (2017). Taiwan's National Identity and Cross-Strait Relations. In L. Dittmer (Ed.), *Taiwan and China* (p. 29). California: University of California Press.
- Kang, J. Y. (2003). From “Creeping Independence” to Reluctant Realism? China-Taiwan Relations under the DPP. *International Area Studies Review*, 6(2), 21–42. <https://doi.org/10.1177/223386590300600202>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*. London: Sage Publications Ltd.
- Lan, T. J. (2017). Confucius Institue at Universitas Al Azhar, Jakarta: The unseen power of China. *Wacana*, 18(1), 148–182. <https://doi.org/10.17510/wacana.v18i1.576.Thung>
- Lee, C. Y., & Yin, M. X. (2017). Chinese investment in Taiwan: A challenge or an opportunity for Taiwan? *Journal of Current Chinese Affairs*, 46(1), 37–59.
- Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). *Public Diplomacy*. London: Foreign Policy Centre.
- Lin, G. (2019). *Taiwan's Party Politics and Cross-Strait Relations in Evolution (2008–2018)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lin, S. S. (2016). *Taiwan's China Dilemma Contested Identities and Multiple Interests in Taiwan's Cross-Strait Economic Policy*. California: Stanford University Press.
- Lin, Y., & Hsieh, J. F. sheng. (2016). Change and Continuity in Taiwan's Public Opinion on the Cross-Strait Economic Interactions. *Journal of Asian and African Studies*, 52(8), 1103–1116. <https://doi.org/10.1177/0021909616649210>

- Matsuda, Y. (2015). Cross-Strait Relations under the Ma Ying-jeou administration: From Economic to Political Dependence? *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 4(2), 3–35. <https://doi.org/10.1080/24761028.2015.11869083>
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Pamment, J. (2012). New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice. In *New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice*. <https://doi.org/10.4324/9780203096734>
- Pei-chih, L., Tsung-han, M., & Huang, F. (2018). Twin-city forum to focus on economic issues: Taipei mayor | Cross-Strait Affairs | FOCUS TAIWAN - CNA ENGLISH NEWS. Retrieved November 29, 2019, from [focustaiwan.tw](http://focustaiwan.tw/news/acs/201812190010.aspx) website: <http://focustaiwan.tw/news/acs/201812190010.aspx>
- Rawnsley, G. (2012). Approaches to soft power and public diplomacy in China and Taiwan. *Journal of International Communication*, 18(2), 121–135. <https://doi.org/10.1080/13216597.2012.695744>
- Robert, J. (2010). *Chinese Mythology A to Z*. New York: Chelsea House.
- Santoso, R. B., Surya, A., Hidayat, T., & Dermawan, W. (2020). China ' s Public Diplomacy in Taiwan. *Atlantis Press*, 391, 52–55.
- Theo, R., & Leung, M. W. H. (2018). China's Confucius Institute in Indonesia: Mobility, frictions and local surprises. *Sustainability (Switzerland)*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/su10020530>
- Tuch, H. (1990). *Communicating with the World: US Public Diplomacy Overseas*. New York: St. Martin's Press.
- Wang, N. T. (2014). Taiwan ' s Economic Relations with Mainland. *Asian Affairs*, 18(2), 99–119.
- Weng, L. C. D. (2017). Can economic profit influence public opinion? Observing generational change on cross-strait relations in Taiwan. *Asian Journal of Comparative Politics*, 2(4), 362–384. <https://doi.org/10.1177/2057891116687878>
- Xiaowei, L., & Baiting, C. (2016). The Cross-Strait Peace Development Forum is closed, and the Qing Lu will recruit 260 Taiwanese teachers. Retrieved November 16, 2019, from [chinatimes.com](http://www.chinatimes.com) website: <https://www.chinatimes.com/newspapers/20161104000368-260108?chdtv>
- Zaharna, R. S. (2010). *Battles to Bridges, U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11 Studies* (R. S. Zaharna, Ed.). New York: Palgrave Macmillan.